



## Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Temon Kabupaten Ponorogo Dengan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Haryanto Bagus Saputro<sup>1</sup>, Ririt Iriani Sri Setiawati<sup>2</sup>, Mohammad Wahed<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

---

### Abstract

Received: 14 Agustus 2023

Revised: 15 September 2023

Accepted: 22 September 2023

*One of the welfare factors is to have a decent residence. One of the government's programs to help the community, especially low-income people, is the self-help housing stimulant assistance program (BSPS) which aims to improve the quality of livable houses for MBR independently. In this BSPS program, researcher as a companion for empowerment facilitators is tasked with assisting the implementation of BSPS in Temon village, Ponorogo regency, which includes the stages of organizing aid recipients, socialization and counseling, identifying self-help, determining work plans, and construction assistance. The purpose of this assistance is to encourage and assist to society so that self-help arises from the government in improving the quality of houses. The result of this dedication, namely the BSPS program, was welcomed by the people of Temon village, Ponorogo Regency, as evidenced by the high value of self-help and mutual cooperation arising from the beneficiary group.*

**Keywords:** BSPS, Welfare, Livable Homes, MBR

(\*) Corresponding Author: [20011010036@student.upnjatim.ac.id](mailto:20011010036@student.upnjatim.ac.id)

**How to Cite:** Saputro, H. B., Setiawati, R. I. S., & Wahed, M. (2023). Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Temon Kabupaten Ponorogo Dengan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8396473>.

---

### PEDAHULUAN

Setiap negara memiliki tujuan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah berupaya melakukan segala upaya untuk membuat negara, terutama masyarakatnya, menjadi maju baik dalam hal infrastruktur maupun sumber daya manusia. Oleh karena orientasi pembangunan terletak pada kesejahteraan masyarakatnya, setiap negara melalui pemerintah harus berupaya dengan keras untuk mewujudkannya dengan melali kebijakan-kebijakan yang dibuat secara terarah dan terencana. Tujuan dari kebijakan tersebut tidak boleh hanya untuk keuntungan negara saja namun sesuai dengan falsafal pancasila kita, negaraharus dapat pemeratakan kesejahteraan masyarakatnya agar tidak terjadi ketimpangan antar daerah yaitu dengan kebijakan fiskal dan program-program strategis lainnya. Kesejahteraan sendiri menurut (Ritonga, 2003) dalam (Desyra, Dengo, and Londa 2021) dapat dilihat melalui berkurangnya angka kemiskinan di suatu daerah. Permasalahan yang masih banyak terjadi terutama pada negara berkembang adalah kemiskinan dan Indonesia masih dalam status tahap berkembang. Definisi kemiskinan sendiri yaitu suatu keadaan menyangkut kehidupan perekonomian seseorang atau kelompok dimana tidak mempunyai keterjaminan dalam faktor pendapatan, aset-aset pasif dan produktif, kebutuhan pokok dasar yang baik dan berkualitas, rendahnya kualitas akses mendapatkan kesehatan, hak dalam mendapatkan jaringan kehidupan yang layak,

infrastruktur yang jauh terlerpencil hingga rendahnya kualitas perumahan yang menunjang kehidupan yang layak.

Penduduk Indonesia didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) per bulan Januari 2023 ini adalah sebanyak 273,52 juta jiwa dan akan terus bertambah tiap tahunnya. Dengan adanya pertumbuhan penduduk yang mempunyai kecenderungan naik, pasti akan juga banyak permasalahan yang terjadi. Teori dari Malthus yang disampaikan oleh (Michael P. Todaro 2011) menjelaskan dimana pertumbuhan penduduk pada suatu negara yang semakin meningkat juga menyebabkan naiknya angka kemiskinan. Dalam aspek ekonomi, arti dari kemiskinan yaitu kurangnya kemampuan seseorang dalam mengakses sumber daya yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kesejahteraan pada taraf yang tinggi. Sumber daya yang dimaksud bukan hanya dalam arti perspektif finansial namun lebih dari pada itu juga semua aset dan faktor yang menyebabkan kesejahteraan secara umum terbentuk. Dari konsep kemiskinan ini, penilaian kemiskinan dapat dilakukan secara langsung dengan mengidentifikasi dan mengukur sumber daya yang tersedia. Pendekatan ini memungkinkan pengukuran kemiskinan dengan membandingkan ketersediaan sumber daya terhadap suatu standar yang disebut garis kemiskinan. Metode semacam ini sering disebut sebagai pengukuran kemiskinan yang bersifat absolut.

Tidak bisa dipungkiri kemiskinan merupakan permasalahan global yang bukan hanya Indonesia saja namun berbagai negara juga mengalami hal yang serupa dengan variabel penyebabnya yang berbeda-beda sesuai budaya dan kebiasaan masyarakatnya, namun semua negara sepakat dalam pengentasan kemiskinan ini merupakan tugas bagi pemerintahan untuk turut menstimulasi dengan berbagai program yang direncanakan. Oleh karena kondisi perekonomian yang baik menjadi modal utama untuk berangkat dari negara berkembang ke negara maju, dilansir dari (Nation 2023) Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) telah membuat rumusan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) dengan 17 Tujuan yang akan diimplementasikan sebagian oleh beberapa negara sesuai dengan permasalahan yang negara tersebut hadapi. Pada hakikatnya SDGs adalah program Global yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan, ketidak setaraan, peran pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat serta kepedulian terhadap bumi. Timbulnya permasalahan kemiskinan juga dapat dilihat dengan permasalahan yang terjadi dimana ada ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan pokok yaitu tempat tinggal, makanan, pakaian, kesehatan dan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan hayati lain. Kondisi populasi manusia yang semakin meningkat namun berbanding terbalik dengan lapangan pekerjaan membuat ketimpangan kesejahteraan semakin tinggi, oleh karena itu dalam mengakomodasi semua orang, kita perlu membangun tata kota yang berkelanjutan (United Nation, 2023). Agar masyarakat bisa bertahan dan sejahtera dalam beraktivitas sehari-hari, kita membutuhkan perencanaan kota yang baru dan cerdas yang menciptakan keamanan terjangkau, dan kota tangguh salah satunya dengan peningkatan rumah layak huni untuk meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

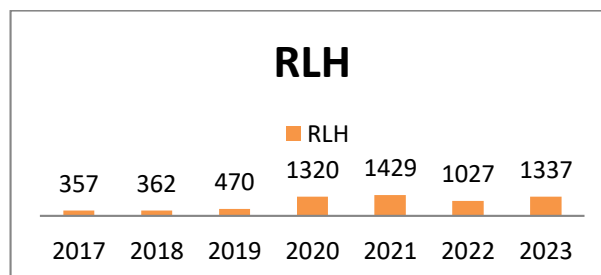
Dalam menerapkan amanah undang-undang serta menjawab tantangan SDGs dari Persatuan Bangsa Bangsa, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merancang dan membuat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam membantu Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (MBR) meningkatkan kualitas rumah secara swadaya dan gotong royong. BSPS sendiri diatur pada Surat Edaran Dirjen Perumahan Nomor 14/SE/Dr/2022 dalam Peraturan Menteri PUPR No 7 Tahun 2022 mengenai petunjuk penyelenggaraan program BSPS. Tujuan dari program BSPS ini adalah untuk dorongan dan peningkatan keswadayaan masyarakat penting untuk memberikan akses kepada mereka dalam memenuhi kebutuhan akan rumah yang layak huni secara mandiri.



**Grafik 1** Neraca Capaian Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020-2024<sup>1</sup>

Dalam tiga tahun terakhir Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus mengucurkan dananya untuk kebutuhan pembangunan perumahan terutama rumah swadaya, dapat dilihat pada grafik diatas bahwa total Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani oleh program BSPS. Masih perlu banyaknya rumah swadaya yang harus dibangun dari program BSPS ini mengingat masih banyaknya rumah yang tidak layak huni dari berbagai pelosok desa di Indonesia. Pelaksanaan program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dilakukan di berbagai kota dan kabupaten di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Ponorogo yang akan dibahas dalam artikel ini. Dimana capaian program dapat dilihat pada grafik berikut :



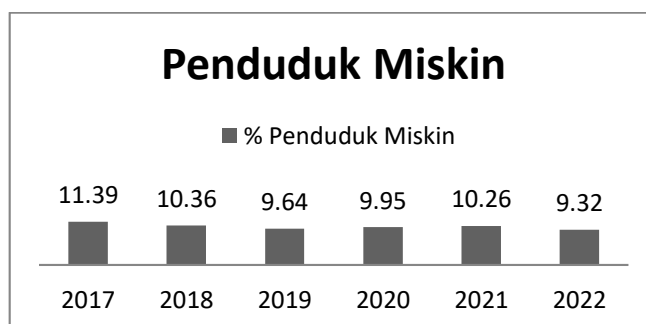
**Grafik 2** Capaian RTLH yang tertangani BSPS menjadi RLH<sup>2</sup>

Dalam tabel diatas merupakan data perkembangan BSPS di Ponorogo dari tahun 2017-2023 dimana secara keseluruhan terjadi peningkatan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2022 yang dikarenakan penyesuaian anggaran akibat pandemi, jumlah kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mengalami penurunan. Namun, masih diperlukan adanya peningkatan kuota BSPS agar dapat meningkatkan kualitas rumah yang layak huni bagi MBR secara swadaya dan gotong royong. Swadaya masyarakat berperan penting dalam menyukseskan

<sup>1</sup> Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan, Sekretariat Jenderal, data.pu.go.id/visualisasi/neraca-renstra-2020-2024.

<sup>2</sup> Data BSPS Ponorogo

program ini karena sejatinya BPS merupakan stimulasi saja, oleh karena itu swadaya dan gotong royong masyarakat menjadi poin utama dalam program BPS ini. yang besar merupakan suatu keberhasilan program. Fungsi rumah layak huni menurut (Hooimeijer 2014) yaitu sebagai tempat tinggal tidak hanya digunakan untuk melakukan kegiatan, tetapi juga memiliki fungsi sosio-psikologis seperti keamanan dan privasi. Dari pernyataan tersebut menunjukkan rumah bukan hanya sekedar bangunan naun juga sebagai tempat berlindung dan tempat kenyamanan dan kemakmuran hidup. Dalam kaitannya pada aspek ekonomi juga rumah layak huni adalah suatu cerminan untuk kehidupan yang layak karena dapat meningkatkan produktivitas penghuninya, dengan begitu fokus para MBR sudah tidak lagi untuk memperbaiki asetnya namun sudah lebih kepada meningkatkan pendapatan dan kualitas kehidupannya menjadi lebih baik dalam hal pendidikan dan kesehatan.



**Grafik 3** Persentase Penduduk Miskin Ponorogo 2017-2022 (BSPS)

Dari grafik yang diolah di atas merupakan persentase penduduk miskin Kabupaten Ponorogo tahun 2017-2022 dimana mempunyai kecenderungan menurun namun pada 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,31 persen sebagai dampak pasca pandemi covid-19. Oleh karena itu rumah layak huni dalam program BPS ini menjadi penting dimana dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat khususnya untuk menurunkan kemiskinan.

Program BPS sendiri merupakan program yang strategis karena selain dapat bermanfaat dalam peningkatan rumah, juga sebagai pembuka lapangan pekerjaan karena tukang yang direkrut untuk pembangunan rumah berasal dari wilayah itu sendiri. Terlebih pada masa pandemi Covid-19 yang menjadikan lapangan pekerjaan terutama tukang menurun karena proyek pembangunan yang sepi, dengan adanya program BPS ini tukang dapat memperoleh proyek pekerjaan yang dapat membantu meningkatkan perekonomian. Dengan program BPS tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan secara langsung dapat meningkatkan nilai tabungan dan investasi baik secara regional maupun nasional. Ketentuan rumah layak huni yang dirumuskan pemerintah yang tertuangkan dalam secara garis besar adalah aspek struktur bangunan yang kuat, material yang berkualitas, kecukupan luas bangunan, akses pencahayaan dan penghawaan, akses air minum dan sanitasi. Aspek sanitasi dan akses air minum tersebut juga merupakan tujuan SDGs yaitu tujuan 6 yaitu Air Bersih dan Sanitasi dimana hal krusial yang perlu diperhatikan karena air merupakan sumber kehidupan, akses air yang bersih dan sanitasi yang layak dapat menunjang kehidupan masyarakat menurunkan risiko penyakit dan kematian.

Oleh karena itu, modul ini dibuat untuk sebagai informasi dan penggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya rumah layak huni untuk meningkatkan kesejahteraan. Artikel ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan mereka tentang program BSPS. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang program ini, masyarakat dapat mengetahui tujuan, implementasi, dan manfaat dari program BSPS. yang dilaksanakan oleh peneliti di Kabupaten Ponorogo serta acuan dalam melaksanakan program BSPS dalam membangun Rumah Layak Huni secara swadaya oleh masyarakat.

## **METODE**

Metode pelaksanaan yang dilakukan peneliti adalah dengan jenis penelitian deskriptif pendekatan kualitatif terkait pelaksanaan pembangunan rumah layak huni pada program BSPS di lokasi desa Temon Kecamatan Sawoo kabupaten Ponorogo. Peneliti juga menyajikan kajian dan data berupa materi Kementerian PUPR terkait program BSPS yang diberikan oleh pihak Dirjen perumahan selain itu juga data berupa dokumentasi penerapan di lapangan yaitu Desa Temon Kelurahan Sawoo Kabupaten Ponorogo yang diperoleh dari wawancara dari koordinator kabupaten dan tenaga fasilitator lapangan. Data dan kajian yang diperoleh akan disajikan oleh peneliti untuk disusun agar memudahkan masyarakat dalam memahami terkait alur program BSPS di Kabupaten Ponorogo serta penilaian mengenai implikasi program BSPS dengan kesejahteraan masyarakat desa Temon Kabupaten Ponorogo.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya**

Menurut pedoman yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang disampaikan melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Perumahan dengan nomor 14/SE/Dr/2022, dijelaskan tentang prosedur pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus. Dokumen tersebut memberikan panduan teknis mengenai penyelenggaraan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dapat disimpulkan bahwa program BSPS adalah suatu bentuk dukungan dana yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas rumah secara swadaya dengan semangat gotong-royong. Penilaian kualitas rumah untuk mengidentifikasi kebutuhan perbaikan rumah layak huni setidaknya harus memenuhi 4 indikator Syarat rumah layak huni yaitu :

- a. Ketahanan/Keselamatan Bangunan: Komponen struktur seperti pondasi, sloof, kolom, balok, dan rangka atap harus memiliki keandalan yang baik. Hal ini meliputi kualitas dimensi komponen, campuran bahan yang digunakan, dan ikatan antar komponen tersebut. Selain itu, keandalan non-struktur seperti lantai, dinding, kusen, daun pintu, jendela, dan penutup atap juga perlu diperhatikan.
- b. Kecukupan Luas: Setiap orang harus memiliki luas ruangan minimal 7,2 m<sup>2</sup>. Selain itu, tinggi ruangan minimal harus mencapai 2,8 m.
- c. Akses Sanitasi Layak: Fasilitas sanitasi yang layak harus tersedia, seperti MCK (Mandi, Cuci, Kakus), septic tank, tempat sampah, saluran pembuangan air kotor, dan limbah yang memenuhi standar. Jarak antara fasilitas sanitasi dengan sumur air bersih minum minimal harus sekitar 10 meter.

d. Akses Air Minum Layak: Akses air minum harus mudah terjangkau dari segi waktu dan jarak tempuh. Selain itu, kualitas air tersebut juga harus memenuhi syarat sebagai air minum yang layak. Kualitas air yang baik meliputi tidak berbau, tidak berasa, tidak mengandung mikroorganisme, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat.

e. Luasan Pencahayaan & Penghawaan: Pencahayaan minimal harus mencapai 10% dari luas lantai, sedangkan penghawaan minimal harus mencapai 5% dari luas lantai. Hal ini penting untuk menciptakan kondisi yang nyaman dan sehat di dalam rumah.

### **Implementasi Program BSPS di Kabupaten Ponorogo**

Dalam program BSPS ini masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan rumah layak huni dimana disini peneliti sebagai pendamping masyarakat untuk tahapan kegiatan yang dilakukan meliputi persiapan kegiatan hingga pelaksanaan pembangunan sebagai berikut :

#### **Pengorganisasian Penerima Bantuan**



**Gambar 1** Pengorganisasian Kelompok Penerima bantuan desa Temon

Tahap pemberdayaan yang awal dilakukan adalah membentuk organisasi penerima bantuan yang didalamnya terdapat pengurus seperti ketua, wakil, sekretaris dan bendahara yang ditunjuk oleh tokoh masyarakat atau lembaga masyarakat. Pendamping sebagai pemberi arahan untuk masyarakat untuk tugas dan fungsi masing-masing pengurus organisasi. Pengorganisasian ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar mempunyai tanggung jawab dalam membangun rumah layak huni dengan berasaskan gotong royong.

#### **Sosialisasi dan Penyuluhan**



**Gambar 2** Sosialisasi terkait program BSPS

Sosialisasi adalah proses pembelajaran untuk berinteraksi dengan orang lain dalam hal perilaku, pemikiran, dan perasaan, dan hal tersebut memiliki pentingnya dalam mencapai partisipasi sosial yang efektif (Sekarningrum, Sugandi, and Yunita 2020). Metode yang digunakan dalam pelaksanaan sosialisasi desa peneliti adalah dengan cara pengumpulan kelompok penerima bantuan dalam satu tempat yaitu di Balai Desa Temon dengan penyampaian secara langsung dengan dihadiri penerima bantuan, aparat kelurahan, dan kelompok masyarakat. Adapun dalam sosialisasi pembahasan berfokus pada abstraksi kegiatan pada program.

### Identifikasi Keswadayaan Masyarakat

Prinsip keswadayaan mengutamakan dan menghargai kemampuan masyarakat daripada bergantung pada bantuan dari pihak lain. Prinsip ini tidak melihat orang miskin sebagai objek yang tidak memiliki kemampuan, tetapi sebagai subjek yang memiliki kemampuan terbatas (Indarwati, Wahyuni, and Wisudanto 2020). Selaras dengan itu, kegiatan ini bertujuan untuk menggali kemampuan swadaya calon peneriman bantuan dalam memenuhi kekurangan pembangunan karena sejatinya program BSPS adalah hanya sebatas stimulus untuk masyarakat agar mau untuk meningkatkan kualitas rumahnya. Peneliti sebagai pendamping masyarakat mengupayakan untuk terus menggali keswadayaan yang ada seperti hasil jual ternak atau panen, hingga bongkaran sisa seperti genteng dan kayu. Hal tersebut demi kebaikan masyarakat agar memaksimalkan pembangunan rumah layak huni.

**Table 1 Rincian Keswadayaan Masyarakat desa Temon**

No.	No. BNBA	Nama MBR	Jenis Swadaya 1	Nilai Swadaya 1 (Rp)	Jenis Swadaya 2	Nilai Swadaya 2 (Rp)
1	128	HELIANTO	Ternak	Rp30.000.000	Bekas Bongkaran	Rp2.000.000
2	129	GENTI	Ternak	Rp2.500.000	Bekas Bongkaran	Rp2.000.000
3	130	TUMIRAN NUR AZIZ	Ternak	Rp34.000.000	Bekas Bongkaran	Rp3.000.000
4	131	SOIMAH	Pasir	Rp900.000	Bekas Bongkaran	Rp2.500.000
5	132	SOIKUN	Ternak	Rp2.000.000	Bekas Bongkaran	Rp2.500.000
6	133	MARIADI	Ternak	Rp2.000.000	Bekas Bongkaran	Rp3.000.000
7	134	TAMBIR	Ternak	Rp2.000.000	Bekas Bongkaran	Rp2.500.000
8	135	AFEQ SETYAWAN	Genteng	Rp1.000.000	Bekas Bongkaran	Rp1.500.000
9	136	SUKIR	Bata Merah	Rp2.000.000	Bekas Bongkaran	Rp2.500.000
10	137	TOKIT PURWITO	Ternak	Rp36.000.000	Bekas Bongkaran	Rp2.500.000
11	138	SOIRAN	Kayu	Rp3.000.000	Bekas Bongkaran	Rp4.000.000
12	139	BIBIT MOBROT	Kayu	Rp2.000.000	Bekas Bongkaran	Rp2.500.000
13	140	PAIMUN	Ternak	Rp40.000.000	Bekas Bongkaran	Rp1.500.000
14	141	MISMUN	Ternak	Rp3.500.000	Bekas Bongkaran	Rp2.500.000
15	142	MISIRAN	Kayu	Rp3.000.000	Bekas Bongkaran	Rp2.000.000

Dalam tabel nilai keswadayaan tersebut menunjukkan banyaknya nilai swadaya yang di ajukan oleh masyarakat menandakan antusiasme masyarakat dalam berswadaya dan meningkatkan kualitas rumah sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan tinggi.

### Rembuk kelompok penetapan jadwal kerja



**Gambar 3** Musyawarah Penetapan Jadwal Kerja

Rembuk artinya musyawarah yang dilakukan oleh beberapa pihak terkait untuk mencari jalan tengah keputusan (Huda and Key 2016). Dalam rembuk ini membahas penentuan target pembangunan yang pastinya menjadikan pengerjaan rumah menjadi lebih efisien karena tukang dan kelompok penerima bantuan diharuskan menyelesaikan dalam waktu tertentu. Pendamping sebagai penengah masyarakat untuk menentukan jadwal kerja. Adapun hasil kesepakatan bahwa pembangunan dilaksanakan maksimal 20 hari hingga rumah selesai.

### Pendampingan Konstruksi



**Gambar 4** Pendampingan Konstruksi

Pendampingan pelaksanaan konstruksi bertujuan untuk memonitoring penerima bantuan dan tukang dalam pembangunan rumah. Peneliti bertugas dalam mengarahkan tukang dan penerima dalam pengerjaan rumah agar sesuai dengan juknis SE Dirjen Perumahan Nomor 14/SE/Dr/2022. Pendampingan tidak hanya dari segi teknis saja namun lebih kepada pemberdayaan masyarakat yang ditekankan untuk mengubah pemikiran masyarakat dan tukang atau pekerja dari membangun rumah yang hanya seadanya dan menjadi pemikiran yang menekankan bahwa membangun rumah harus mempunyai struktur dan material yang baik, terdapat akses sanitasi, pencahayaan dan penghawaan yang cukup dan kecukupan luas sesuai dengan petunjuk teknis ditjen perumahan. Pendampingan konstruksi di desa Temon ini membuahkan hasil bahwa penerima bantuan dan tukang yang akhirnya lebih mengerti bagaimana rumah yang baik untuk penghuninya. Selain itu pendamping pemberdayaan akan terus menguatkan kelompok penerima bantuan dalam hal gotong-royong dan kerja sama dalam membangun agar pekerjaan cepat selesai. Indikator program BPS yang berhasil yaitu dari masyarakat yang memiliki keswadayaan yang tinggi baik dari dana tunai serta dari tenaga gotong royong yang timbul dari masyarakatnya sendiri.

#### **BSPS Sebagai Program Peningkatan Kesejahteraan**

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, menurut penelitian (Sarbaini et. al. 2022) salah satu faktor kesejahteraan adalah perumahan dan lingkungan. Pemukiman merupakan suatu kebutuhan yang dasar bagi manusia dan juga merupakan salah satu faktor dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia (SDM), ini semua dapat dilakukan dengan tujuan mengurangi problematik penduduk terutama masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mampu meningkatkan kualitas rumah. Dalam pendampingan program BSPS di desa Temon Kabupaten Ponorogo ini membuktikan bahwa salah satu peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu rumah layak huni telah terpenuhi.

#### **DISKUSI**

##### **Rumah Layak Huni**

Rumah yang layak huni dapat diinterpretasikan melalui beberapa perspektif, seperti sosiologis, filosofis, kesehatan, legalitas, fisik, dan energi. Paling tidak, rumah yang layak huni harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara manusiawi (Widiawati 2022). Hal tersebut selaras dengan program BSPS yang memenuhi kebutuhan manusia untuk hidup secara manusiawi yaitu dengan menetapkan syarat minimal seperti yang sudah dijelaskan diatas mengenai syarat rumah layak huni BSPS

##### **Masyarakat Berpenghasilan Rendah**



MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) adalah sebutan untuk masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam daya beli, sehingga mereka memerlukan bantuan dari pemerintah untuk dapat memperoleh rumah (PUPR, 2022). Program BSPS sendiri sudah tepat untuk ditujukan ke masyarakat berpenghasilan rendah yang kekurangan akses terhadap sumber daya kunci untuk membangun rumah.

### **Kesejahteraan**

Kesejahteraan dapat dimaknai sebagai kemampuan suatu keluarga untuk memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan agar dapat menjalani kehidupan yang layak, sehat, dan produktif. (Mulia dan Saputra 2020). Kesejahteraan merujuk pada kondisi di mana kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih, serta memiliki kesempatan untuk pendidikan dan pekerjaan yang memadai guna meningkatkan kualitas hidupnya terpenuhi. Dalam kondisi kesejahteraan, individu bebas dari kemiskinan, ketakutan, kebodohan, atau kekhawatiran, serta dapat hidup dalam kedamaian dan keamanan, baik secara fisik maupun mental. (Fahrudin 2012 dalam Rosni 2017)

### **Kemiskinan**

Menurut Parthiban (2013) dalam (S Gopal et al. 2021) dalam konteks kemiskinan multidimensi, definisi operasional terdiri dari dua bentuk, yaitu dimensi material dan dimensi bukan material. Dimensi material mengacu pada seseorang yang mengalami kekurangan dalam hal pendapatan atau tidak mencapai tingkat kebutuhan sehari-hari yang memadai. Sedangkan dimensi bukan material berfokus pada aspek-aspek kepribadian dan kemanusiaan seperti faktor emosional, psikologis, dan spiritual. Dimensi ini melibatkan aspek-aspek yang tidak terkait dengan pendapatan, seperti pendidikan, akses kehidupan, pekerjaan, dan kesehatan. Xiao (2017) dalam (Raharti, Laras, and Oktavianti 2021) berpendapat terus munculnya kemiskinan berkontribusi pada fenomena yang dikenal sebagai lingkaran setan kemiskinan (*vicious cycle of poverty*). Adanya kondisi keterbelakangan, pasar yang tidak sempurna, dan kurangnya modal menjadi faktor penyebab rendahnya income yang diterima oleh masyarakat. Tingkat pendapatan yang rendah menghasilkan tabungan yang minim, yang pada gilirannya menyebabkan investasi yang rendah pula.

### **Pengaruh BSPS Terhadap Kemiskinan**

Penelitian yang dilakukan oleh Indayani dan Sadriah (2020) menyebutkan program ada pengaruh BSPS terhadap pengentasan kemiskinan. Hal ini juga diperkuat oleh (Wijayanto 2021) dalam penelitiannya menyatakan terdapat hubungan linear antara status rumah tidak layak huni dan status kemiskinan dalam sebuah rumah tangga. Meskipun tingkat korelasinya rendah, namun korelasi antara kedua variabel ini signifikan. Program BSPS yang dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan kekumuhan dan meningkatkan kualitas bangunan serta hunian mempunyai dampak signifikan terhadap penerima bantuan atau masyarakat, dalam hal ini masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk rumah layak huni. (Hara 2020). Dalam penelitian ini membuktikan bahwa program BSPS ini telah meningkatkan salah satu indikator kesejahteraan yaitu rumah layak huni bagi masyarakat desa Temon Kabupaten Ponorogo.

## KESIMPULAN

Rumah layak huni merupakan rumah yang harus meliputi triteria ketahanan/keselamatan bangunan, kecukupan luas hunian, akses sanitasi layak, akses air minum serta luasan pencahayaan & penghawaan. Pemerintah melalui program BSPS membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni dengan prakarsa dan keswadayaan dari masyarakat itu sendiri. Pelaksanaan BSPS di kabupaten Ponorogo yang dilaksanakan dengan mahasiswa magang sebagai pendamping fasilitator mendampingi masyarakat dari pengorganisasian, sosialisasi, identifikasi keswadayaan, rebug kelompok penerima bantuan, hingga pendampingan konstruksi membuahkan hasil keberhasilan yang dicapai dibuktikan oleh pelaksanaan BSPS yang didukung penuh oleh masyarakat dilihat dari banyaknya antusiasme masyarakat yang menyalurkan keswadayaannya berupa penjualan hewan ternak dan bekas bongkaran yang mereka punyai. Selain itu bentuk kegotong royongan yang muncul dari kelompok penerima bantuan juga sebagai keberhasilan sesuai dengan tujuan BSPS UU PKP no 1 tahun 2011. Pelaksanaan BSPS menjadi faktor peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan desa Temon Kabupaten Ponorogo dengan bentuk peningkatan rumah layak huni sebagai salah satu indikator kesejahteraan.

## REFERENCES

- B, Indayani, and Sitti Sadriah. 2020. "Pengaruh Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Terhadap Pengentasan Kemiskinan." *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)* 2(2):103–16. doi: 10.31605/jepa.v2i2.661.
- Desyra, Tendean Elysa, Salmin Dengo, and Londa. 2021. "Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dalam Penyediaan Rumah Layak Huni Di Desa Tolok Satu Kecamatan Tompasso Kabupaten Minahasa." *Jurnal Administrasi Publik* Vii(110):35–45.
- Hara, Kufli Muak. 2020. "Pengaruh Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pada Masyarakat Di Kelurahan Lowulowu Kecamatan Lealea Kota Baubau." *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 5(2):73–81. Doi: 10.35326/Pencerah.V5i2.541.
- Hooimeijer, F. 2014. *More Urban Water: Design And Management Of Dutch Water Cities*. Crc Press.
- Huda, Anam Miftakhul Huda, And Vembita Sapna Key. 2016. "Model Guyup Rembug Dalam Penyelesaian Konflik : Pada Konflik Antara Forpak Dengan Karang Taruna Di Desa Sidodadi." *Translitera* 4(2):1–16.
- Indarwati, Retno, Sylvia Dwi Wahyuni, And Wisudanto. 2020. "Pemberdayaan Masyarakat : Pengolahan Bligo Pada Masyarakat Stren Kali Medokan Semampir Surabaya Retno." *Jurnal Penelitian Masyarakat Kesehatan* 6(1):46–52.
- Michael P. Todaro, Stephen C. Smith. 2011. *Pembangunan Ekonomi Jilid 1*. 11th Ed. Edited By S. N. I. M. Adi. Jakarta: Erlangga.
- Mulia, Rizki Afri, And Nika Saputra. 2020. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang." *Jurnal El-Riyasah* 11(1):67. Doi: 10.24014/Jel.V11i1.10069.

- Nation, United. 2023. *General Assembly Economic And Social Council Advance Unedited Progress Towards The Sustainable Development Goals* :
- PUPR. 2020. “Neraca Capaian Rencana Strategis Kementerian Pupr Tahun 2020-2024.” *Kementerian Pupr* 1. Retrieved July 2, 2023 (Data.Pu.Go.Id/Visualisasi/Neraca-Renstra-2020-2024).
- PUPR, Kementerian. N.D. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022*.
- Raharti, Rini, Titi Laras, And Oktavianti Oktavianti. 2021. “Model Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia.” *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis* 12(2):257–70. Doi: 10.33059/Jseb.V12i2.2422.
- Rosni, Rosni. 2017. “Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara.” *Jurnal Geografi* 9(1):53. Doi: 10.24114/Jg.V9i1.6038.
- S Gopal, Parthiban, Muhammad Alnaufal Abdul Rahman, Nor Malina Malek, Paramjit Singh Jamir Singh, And Law Chee Hong. 2021. “Kemiskinan Adalah Satu Fenomena Multidimensi: Suatu Pemerhatian Awal.” *Malaysian Journal Of Social Sciences And Humanities (Mjssh)* 6(1):40–51. Doi: 10.47405/Mjssh.V6i1.608.
- Sarbaini, Sarbaini, Zukrianto Zukrianto, And Nazaruddin Nazaruddin. 2022. “Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Pembangunan Rumah Layak Huni Di Provinsi Riau Menggunakan Metode Analisis Regresi Sederhana.” *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri Terapan* 1(3):131–36. Doi: 10.55826/Tmit.V1i3i3.46.
- Sekarningrum, Bintarsih, Yogi Suprayogi Sugandi, And Desi Yunita. 2020. “Sosialisasi Dan Edukasi Kangpisman (Kurangi, Pisahkan Dan Manfaatkan Sampah).” *Kumawula: Jurnal Penelitian Kepada Masyarakat* 3(1):73. Doi: 10.24198/Kumawula.V3i1.25244.
- Widiawati, Kristiana. 2022. “Indikator Rumah Tidak Layak Huni Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Provinsi Jawa Tengah.” *Jurnal Widya Praja* 2(1).
- Wijayanto, Nton Tri. 2021. “Hubungan Kondisi Rumah Tidak Layak Huni Dan Status Kemiskinan Rumah Tangga Di Provinsi Sulawesi Utara.” *Jmbi Unsrat* 8(3):668–80.